

Katalog: 7203005.53
ISSN 2528-2158

Statistik

**KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Volume 15, 2024

2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Statistik

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Provinsi Nusa Tenggara Timur

Volume 15, 2024

2023

<https://ntt.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR 2023

Volume 15, 2024

Katalog : 7203007.53
ISSN : 2528-2158
Nomor Publikasi : 53000.24059

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii+64 halaman

Penyusun Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pembuat Cover : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TIM PENYUSUN
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR 2023

Volume 15, 2024

Pengarah
Matamira Banggu Kale

Penanggung jawab
Demarce M. Sabuna

Penyunting
Putu Dita Pickupana

Pengolah Data dan Penulis Naskah
Anarela Mendonca

Penata Letak
Dwijayanti Lia Lita Bale

KATA PENGANTAR

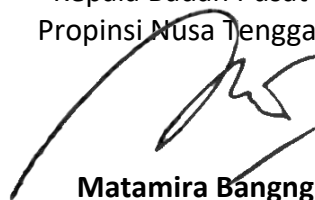
Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur 2023 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Publikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terhadap data statistik keuangan pemerintah daerah.

Data yang disajikan dalam bentuk publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari kantor Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh kantor Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Saran dan kritik berbagai pihak dalam rangka perbaikan publikasi ini pada masa mendatang sangat kami harapkan. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini bermanfaat bagi semua pengguna data secara umum. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami mengucapkan terima kasih.

Kupang, Oktober 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Propinsi Nusa Tenggara Timur,



Matamira Bangngu Kale

DAFTAR ISI

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2023
Volume 15, 2024**

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	xi
BAB I Penjelasan Umum	1
BAB II Ringkasan Analisis Keuangan Pemerintah Daerah	7
Daftar Pustaka	17
Lampiran	19

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT.....	9
Tabel 2.2 Rincian Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT, 2023	10
Tabel 2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	11
Tabel 2.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
Tabel 2.5 Rincian Belanja Pemerintah Provinsi NTT, 2023	13
Tabel 2.6 Alokasi dan Realisasi Dana Desa di NTT.....	14

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pendapatan Pemerintah Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 21
Lampiran 2	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 22
Lampiran 3	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 23
Lampiran 4	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 24
Lampiran 5	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 25
Lampiran 6	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 26
Lampiran 7	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 27
Lampiran 8	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 28
Lampiran 9	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 29
Lampiran 10	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 30
Lampiran 11	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 31
Lampiran 12	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 32
Lampiran 13	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 33
Lampiran 14	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 34
Lampiran 15	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 35
Lampiran 16	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 36
Lampiran 17	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 37
Lampiran 18	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 38
Lampiran 19	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 39
Lampiran 20	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 40
Lampiran 21	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 41
Lampiran 22	Pendapatan Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 42

	Halaman
Lampiran 23	Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 43
Lampiran 24	Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 44
Lampiran 25	Belanja Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 45
Lampiran 26	Belanja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023 46
Lampiran 27	Belanja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 47
Lampiran 28	Belanja Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 48
Lampiran 29	Belanja Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 49
Lampiran 30	Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 50
Lampiran 31	Belanja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 51
Lampiran 32	Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 52
Lampiran 33	Belanja Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 53
Lampiran 34	Belanja Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 54
Lampiran 35	Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 55
Lampiran 36	Belanja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 56
Lampiran 37	Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 57
Lampiran 38	Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 58
Lampiran 39	Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 59
Lampiran 40	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 60
Lampiran 41	Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 61
Lampiran 42	Belanja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 62
Lampiran 43	Belanja Pemerintah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 63
Lampiran 44	Belanja Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023..... 64

1.1. Pendahuluan

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara rutin setiap tahun, yang menyajikan data tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2023.

Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan pemerintah daerah di Provinsi NTT terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Untuk itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan analisis dalam membuat kebijakan dan mengeksekusi program kerja dengan tepat.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data statistik keuangan daerah ini diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kantor gubernur Nusa Tenggara Timur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023

1.3. Konsep dan Definisi

1.3.1. Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - **Pajak daerah** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan ke daerah.

- **Retribusi daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan** adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba PDAM, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non-bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
 - **Lain-lain PAD yang sah** termasuk rincian ini antara lain: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain.
- b. Pendapatan Transfer** yaitu pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan.
- **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
 - Dana transfer umum-Dana bagi hasil (DBH) adalah pendapatan yang mencakup DBH Pajak bumi dan bangunan, DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29, DBH PPH Pasal 21, DBH cukai hasil tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, DBH Sumber daya alam (SDA) Gas Bumi, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam

rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik yaitu dana yang dialokasikan dalam APBD kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - **Dana insentif daerah** merupakan pendapatan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintah umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
 - **Dana Desa** adalah pendapatan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. **Pendapatan transfer antar daerah** yaitu pendapatan yang mencakup bantuan keuangan umum dan khusus baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota.
- d. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

1.3.2. Belanja daerah

Belanja daerah terdiri dari:

1.3.2.1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- Belanja Barang dan Jasa yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- Belanja Hibah yaitu belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa.
- Belanja Bantuan Sosial yaitu belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada organisasi masyarakat, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3.2.2. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

- Belanja modal tanah yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan/pembuatan sertifikat tanah serta belanja administrasi lainnya.
- Belanja Modal peralatan dan mesin yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu belanja yang dilakukan untuk pengadaan bangunan gedung, bangunan monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol.
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

- Belanja Modal Aset Tetap lainnya yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, pengadaan hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, dan aset tetap dalam renovasi.

1.3.2.3. Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

1.3.2.4. Belanja Transfer yaitu pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- Belanja bagi hasil yaitu pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa
- Belanja Bantuan keuangan yaitu pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

<https://ntt.bps.go.id>

BAB II RINGKASAN ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berawal dari krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1998, Indonesia mengambil langkah besar untuk merevolusi struktur politik dan fiskal dari sentralistik menjadi desentralistik. Ditetapkannya Undang-Undang Otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang selanjutnya mengalami revisi penyempurnaan memberikan konsekuensi seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menerapkannya dan diharapkan dapat dari otonomi daerah ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, mengakomodir partisipasi masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, serta menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi kebutuhan dan kondisi masyarakat merupakan inspirasi pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintah daerah.

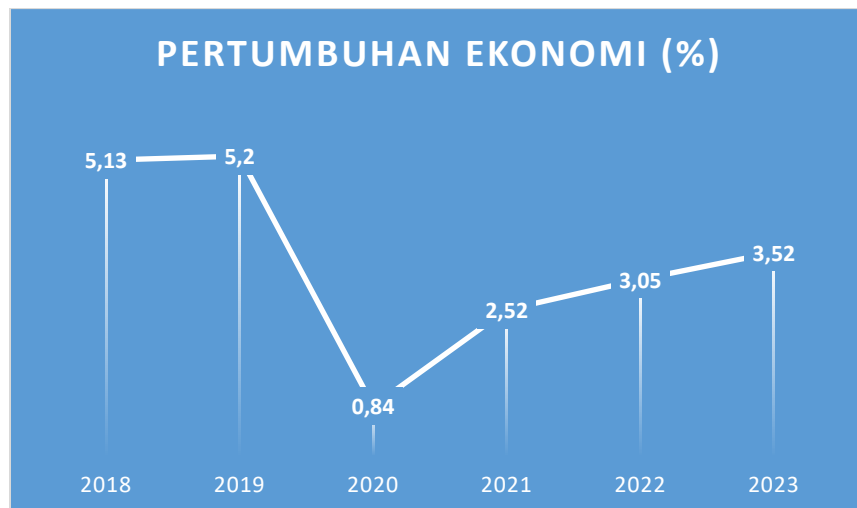
Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan masalah sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur. Dampak dari otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal. Segi positif penerapan desentralisasi fiskal adalah terciptanya efisiensi pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah, karena dilakukan langsung oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah.

Undang-undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memberikan sebagian besar hak pengelolaan keuangan ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengelola kebijakan fiskal yang bersifat makro. Daerah menerima lebih besar proposi keuangan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan yang ada daripada pusat. *Budgeting*

participatory adalah mekanisme baru yang mengikutsertakan masyarakat dalam merumuskan anggaran belanja daerah dari level terendah tingkat desa.

Sebagian komponen utama desentralisasi wewenang pemerintahan, desentralisasi fiskal harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah daerah memiliki hal penuh dalam memanfaatkan sumber-sumber utama pembiayaan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman agar desentralisasi fiskal dapat beroperasi sesuai dengan keinginan perencana. Selain itu, dengan adanya *fiscal gap* pemerintah daerah dituntut untuk menyiasatinya dengan mengidentifikasi pembayar pajak potensial, memperbaiki basis data obyek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan. Dengan demikian, daerah harus dapat memperhitungkan kapasitas kemampuan basis penerimaan yang dimiliki, sehingga dapat menyeimbangkan antara penerimaan dan kebutuhan untuk membiayai belanja pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Desentralisasi diterapkan untuk melepaskan diri dari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah, ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan anggaran pemerintah dari pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2018–2021



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT, 2018–2023

Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pembatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19. Di Tahun 2023 perekonomian NTT sudah mulai memasuki masa pemulihan. Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi NTT 2018–2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT

Tahun	APBD (ribu rupiah)	Realisasi Belanja (ribu rupiah)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	4.781.089.963	4.846.839.267	101,37
2019	5.354.092.406	3.272.862.481	61,12
2020	5.419.935.335	5.755.258.016	101,37
2021	5.312.446.871	5.508.767.904	103,69
2022	4.426.473.562	4.816.652.654	108,81
2023	4.916.185.685	4.609.172.022	93,75

Dari uraian tabel 2.1 menunjukkan adanya defisit APBD. Defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pemerintah daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan baik, sehingga terwujud tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dengan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Opini audit BPK berupa “wajar tanpa pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan daerah memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk berlomba memperbaiki kinerja keuangannya.

Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dianalisis dengan rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Beberapa variabel pengukuran kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan. Rasio kemandirian keuangan daerah

merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya. Sedangkan rasio pertumbuhan merupakan perbandingan antara penerimaan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pendapatan daerah Provinsi NTT tergambar pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rincian Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT, 2023

No	Jenis Pendapatan	Total Penerimaan (ribu rupiah)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.712.892.170	34,84
1.1	Pajak Daerah	1.311.609.133	26,68
1.2	Retribusi Daerah	65.433.703	1,33
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.645.290	1,23
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	275.204.042	5,59
2	Pendapatan Transfer	3.200.914.875	65,11
2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	53.785.499	1,09
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.857.019.095	37,77
2.3	Dana Transfer Khusus (DAK)	1.290.110.281	26,24
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	474.648.628	9,65
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	813.710.057	16,55
2.1.2	Dana Insentif Daerah	–	–
2.1.3	Dana Desa	–	–
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	–	–
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.751.596	0,03
	PENDAPATAN DAERAH	4.915.558.641	100

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi, bergerak antara 20–60 persen dalam kategori sedang hingga sangat baik dalam hal kemandirian keuangan daerah, dengan kata lain bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah baik di Provinsi NTT.

Tabel 2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PAD (ribu Rupiah)	Dana Perimbangan (ribu Rupiah)	Rasio Kemandirian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2023	1.847.176.912	3.200.914.875	0,57	57,71
2022	1.363.737.982	3.053.836.756	0,313	31,27
2021	1.238.032.648	3.993.215.834	0,310	31,00
2020	1.166.570.596	4.152.039.227	0,281	28,10
2019	1.258.956.853	4.069.622.423	0,309	30,94
2018	1.096.370.136	3.680.327.635	0,298	29,79
2017	1.047.491.567	3.643.692.862	0,287	28,75
2016	966.858.995	2.864.659.141	0,338	33,75
2015	882.315.240	1.461.992.423	0,604	60,35
2014	763.337.478	1.282.745.347	0,595	59,51
2013	528.832.134	1.165.848.623	0,454	45,36
2012	459.657.187	1.098.619.869	0,418	41,84
2011	391.828.733	887.291.439	0,442	44,16

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan ini berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan

perhatian. Semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD dan belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD dan belanja operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Berikut adalah tabel rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut

Tabel 2.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	PAD (ribu rupiah)	Rasio Pertumbuhan	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	1.847.176.912	0,35	35,44
2022	1.363.737.982	0,10	10,15
2021	1.238.032.648	0,06	6,12
2020	1.166.570.596	-0,07	-7,34
2019	1.258.956.853	0,15	14,83
2018	1.096.370.136	0,05	4,67
2017	1.047.491.567	0,08	8,34
2016	966.858.995	0,10	9,58
2015	882.315.240	0,16	15,59
2014	763.337.478	0,44	44,34
2013	528.832.134	0,15	15,05
2012	459.657.187	0,17	17,31
2011	391.828.733

Berdasarkan tabel 2.4 Dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD Provinsi NTT tahun 2011 hingga 2023 menunjukkan peningkatan setiap tahun berfluktuatif dengan peningkatan rasio terbesar pada tahun 2014 diharapkan pemerintah Provinsi NTT dapat meningkatkan PAD nya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya dan berusaha tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya.

Belanja daerah merupakan penggerak ekonomi daerah yang memberikan *multiplier effect* di berbagai sektor ekonomi lainnya. Hal ini dapat terjadi apabila belanja daerah dioptimalkan untuk kegiatan produktif.

Tabel 2.5 Rincian Belanja Pemerintah Provinsi NTT, 2023

No	Jenis Belanja	Total Pengeluaran* (ribu rupiah)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja Operasi	3.596.427.411	73,46
1	Belanja Pegawai	1.651.390.116	33,73
2	Belanja Barang dan Jasa	1.564.082.592	31,94
3	Belanja Bunga	63.374.211	1,29
4	Belanja Subsidi	–	–
5	Belanja Hibah	269.028.391	5,49
6	Belanja Bantuan Sosial	48.552.100	0,99
	Belanja Modal	638.064.520	13,03
1	Belanja Modal Tanah	–	–
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.694.164.	3,48
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.490.047	5,83
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	178.807.578	3,65
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.731	0,06
	Belanja Tidak Terduga	11.055.939	0,22
	Belanja Transfer	650.237.594	13,28
1	Belanja Bagi Hasil	649.537.594	13,26
2	Belanja Bantuan Keuangan	700.000	2,04
	BELANJA DAERAH	4.895.785.466	100

Catatan: *angka sementara

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat pada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desanya. Dana desa dialokasikan kepada setiap desa setiap tahun sebagai salah satu pendapatan desa. Alokasi dana desa saat ini bertujuan untuk mendukung visi misi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa namun dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Di tahun 2021, alokasi dana desa diperuntukkan bagi 2.036 desa mencapai 3,06 triliun rupiah. Di tahun 2021, Dana desa yang dialokasikan digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 melalui mekanisme bantuan langsung tunai (BLT-desa). Tabel 2.6 menunjukkan bahwa dalam empat tahun ini (2018–2023) realisasi anggaran dana desa hampir 100 persen.

Tabel 2.6 Alokasi dan Realisasi Dana Desa di NTT

Dana Desa	Alokasi	Realisasi	Persen Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2.549.545.916	2.548.419.000	99,96
2019	3.020.504.603	3.014.436.180	99,80
2020	3.057.358.070	3.057.128.256	99,99
2021	3.059.653.902	3.044.008.478	99,50
2022	2.805.512.355	2.736.462.328	97,54
2023	2.688.677.726	2.688.677.726	100,00

Sumber: Kementerian Desa

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Diperlukan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan menjelaskan rinci penerimaan daerah dan sumber-sumbernya. Selain itu pengelolaan defisit anggaran daerah dengan baik, manajemen sistem keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
- 2) APBD merupakan wujud dari implementasi perencanaan daerah yang mengacu pada perencanaan nasional, oleh karena itu penyusunan harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD berpedoman pada rencana kerja pemerintah nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan nasional. APBD juga berfungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas ekonomi.
- 3) Pengelolaan APBD menjadi penting pada tahapan perencanaan keuangannya. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahapan perencanaan ini. Di tahap pelaksanaan keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintah diimplementasikan untuk mempermudah pengelolaan APBD. Tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas terlaksananya pengelolaan keuangan daerah. Apabila tahap pelaksanaan didukung dengan penggunaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, diharapkan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban tidak akan menemui banyak masalah. Untuk dapat menghasilkan laporan yang baik, diperlukan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian manajemen dan sistem informasi keuangan daerah.
- 4) Beberapa faktor yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik antara lain:
 - Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi manajemen aset daerah.
 - Sarana dan prasarana pada instansi terkait pengelolaan anggaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi NTT 2023



Pendapatan Pemerintah Daerah 2023

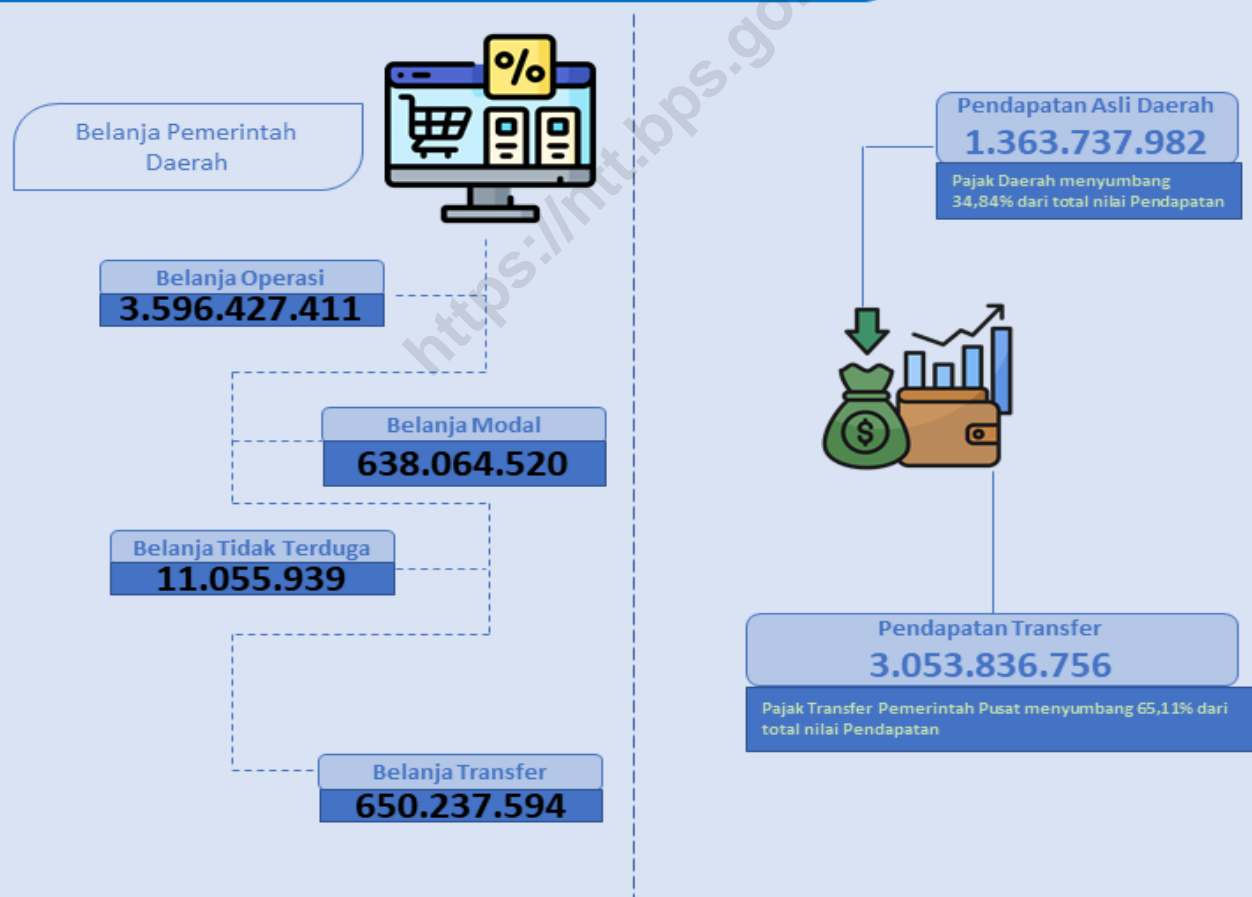
4.915.558.641



Pendapatan Pemerintah Daerah 2022

4.426.473.562

Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah



Sumber : Survei Keuangan Pemerintah Provinsi

Gambar 2 Infografis APBD Pemerintah Provinsi NTT, 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Imam Mugroho, dan Tri Laksono.2005. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press
- Halim, Abdul.2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Hamsiah, Andi.2019. *Manajemen Keuangan Daerah Dalam era Otonomi Daerah*. Pustaka AQ. Yogyakarta
- Karimah, F., Saleh, C., Wanusmawatie, I. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik (JIAP), Vol 2 No 4, 597-602.
- Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Provinsi NTT.2023. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Kupang.
- Republik Indonesia, 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementerian keuangan. Jakarta
- Wahab, La O. A., et al. 2017. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, vol. 2, No. 3.

LAMPIRAN

<https://ntt.pps.go.id>

Lampiran 1 Pendapatan Pemerintah Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	763.446.558	763.446.558
1. Pendapatan Asli Daerah	57.421.271	57.421.271
1. Pajak Daerah	20.790.976	20.790.976
2. Retribusi Daerah	3.815.493	3.815.493
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.500.000	5.500.000
4. Lain-lain PAD yang Sah Revenue	27.314.802	27.314.802
2. Pendapatan Transfer	699.646.660	699.646.660
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	679.422.826	679.422.826
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.223.834	20.223.834
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.378.627	6.378.627
1. Pendapatan Hibah	115.000	115.000
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	6.263.627	6.263.627

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 2 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.239.502.908	1.239.502.908
1. Pendapatan Asli Daerah	105.888.485	105.888.485
1. Pajak Daerah	34.713.550	34.713.550
2. Retribusi Daerah	3.223.735	3.223.735
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.700.000	12.700.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	55.251.200	55.251.200
2. Pendapatan Transfer	1.119.481.100	1.119.481.100
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.074.956.233	1.074.956.233
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.524.867	44.524.867
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.133.323	14.133.323
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	14.133.323	14.133.323

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 3 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.333.685.094	1.333.685.094
1. Pendapatan Asli Daerah	89.878.031	89.878.031
1. Pajak Daerah	31.226.367	31.226.367
2. Retribusi Daerah	18.172.717	18.172.717
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	15.000.000	15.000.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	25.478.947	25.478.947
2. Pendapatan Transfer	1.226.370.811	1.226.370.811
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.194.451.313	1.194.451.313
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.919.498	31.919.498
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.436.252	17.436.252
1. Pendapatan Hibah	1.272.253	1.272.253
2. Dana Darurat	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	16.163.999	16.163.999

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 4 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.589.997.503	1.589.997.503
1. Pendapatan Asli Daerah	86.293.861	86.293.861
1. Pajak Daerah	13.954.088	13.954.088
2. Retribusi Daerah	6.556.736	6.556.736
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.364.060	8.364.060
4. Lain-lain PAD yang Sah Revenue	57.418.977	57.418.977
2. Pendapatan Transfer	1.479.997.504	1.479.997.504
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.445.614.771	1.445.614.771
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.382.733	34.382.733
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.706.138	23.706.138
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	23.706.138	23.706.138

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 5 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian/ (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
PENDAPATAN DAERAH	1.086.906.975	1.086.906.975
1. Pendapatan Asli Daerah	60.000.000	60.000.000
1. Pajak Daerah	15.271.171	15.271.171
2. Retribusi Daerah	4.418.687	4.418.687
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	11.250.093	11.250.093
4. Lain-lain PAD yang Sah	29.060.049	29.060.049
2. Pendapatan Transfer	1.002.639.411	1.002.639.411
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	979.119.457	979.119.457
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.519.954	23.519.954
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.267.564	24.267.564
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	24.267.564	24.267.564

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 6 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian/ (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
PENDAPATAN DAERAH	947.847.952	947.847.952
1. Pendapatan Asli Daerah	95.000.000	95.000.000
1. Pajak Daerah	29.540.81	29.540.81
2. Retribusi Daerah	11.120.462	11.120.462
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.500.000	7.500.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	46.838.727	46.838.727
2. Pendapatan Transfer	839.403.634	839.403.634
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810.642.308	810.642.308
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.761.326	28.761.326
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.444.318	13.444.318
1. Pendapatan Hibah	2.381.242	2.381.242
2. Dana Darurat	-	-
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	11.063.076	11.063.076

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 7 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
PENDAPATAN DAERAH	1.072.507.409	1.072.507.409
Pendapatan Asli Daerah	58.985.685	58.985.685
1. Pajak Daerah	14.625.728	14.625.728
2. Retribusi Daerah	28.411.557	28.411.557
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.055.000	1.055.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	14.893.400	14.893.400
2. Pendapatan Transfer	1.011.021.724	1.011.021.724
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	992.355.858	992.355.858
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.665.866	18.665.866
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.500.000	2.500.000
1. Pendapatan Hibah	2.500.000	2.500.000
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	—	—

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 8 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	863.422.302	863.422.302
1. Pendapatan Asli Daerah	53.051.446	53.051.446
1. Pajak Daerah	15.943.603	15.943.603
2. Retribusi Daerah	20.578.471	20.578.471
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.424.696	4.424.696
4. Lain-lain PAD yang Sah	12.104.676	12.104.676
2. Pendapatan Transfer	802.312.666	802.312.666
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	781.454.947	781.454.947
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.857.719	20.857.719
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.058.190	8.058.190
1. Pendapatan Hibah	250.000	250.000
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	7.808.190	7.808.190

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 9 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.139.385.982	1.139.385.982
1. Pendapatan Asli Daerah	47.955.518	47.955.518
1. Pajak Daerah	17.450.890	17.450.890
2. Retribusi Daerah	24.540.593	24.540.593
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.600.000	2.600.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	3.364.035	3.364.035
2. Pendapatan Transfer	1.082.024.571	1.082.024.571
1. Pendapatan Transfer Pemerintah	1.058.505.046	1.058.505.046
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.519.525	23.519.525
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.405.893	9.405.893
1. Pendapatan Hibah	600.000	600.000
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	8.805.893	8.805.893

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 10 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.192.350.000	1.192.350.000
1. Pendapatan Asli Daerah	105.869.333	105.869.333
1. Pajak Daerah	35.847.445	35.847.445
2. Retribusi Daerah	16.100.606	16.100.606
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.707.467	1.707.467
4. Lain-lain PAD yang Sah Revenue	52.213.815	52.213.815
2. Pendapatan Transfer	1.066.948.486	1.066.948.486
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.032.717.423	1.032.717.423
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.231.063	34.231.063
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.532.181	19.532.181
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.	19.532.181	19.532.181

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 11 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.185.919.899	1.185.919.899
1. Pendapatan Asli Daerah	80.672.842	80.672.842
1. Pajak Daerah	34.158.224	34.158.224
2. Retribusi Daerah	6.515.400	6.515.400
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.500.000	4.500.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	35.499.218	35.499.218
2. Pendapatan Transfer	1.094.985.184	1.094.985.184
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.066.401.093	1.066.401.093
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.584.091	28.584.091
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.261.873	10.261.873
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	10.261.873	10.261.873

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 12 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	850.373.538	850.373.538
1. Pendapatan Asli Daerah	52.302.369	52.302.369
1. Pajak Daerah	10.298.600	10.298.600
2. Retribusi Daerah	10.816.269	10.816.269
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.800.000	3.800.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	27.387.500	27.387.500
2. Pendapatan Transfer	791.784.109	791.784.109
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	777.924.520	777.924.520
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.859.589	13.859.589
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.287.060	6.287.060
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan.	6.287.060	6.287.060

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 13 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.224.389.953	1.224.389.953
1. Pendapatan Asli Daerah	129.470.066	129.470.066
1. Pajak Daerah	35.465.202	35.465.202
2. Retribusi Daerah	17.489.737	17.489.737
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.400.000	6.400.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	70.115.127	70.115.127
2. Pendapatan Transfer	1.091.019.887	1.091.019.887
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.058.635.232	1.058.635.232
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.384.655	32.384.655
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah/Other Legal Revenue	3.900.000	3.900.000
1. Pendapatan Hibah	3.900.000	3.900.000
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	—	—

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 14 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	886.431.268	886.431.268
1. Pendapatan Asli Daerah	28.603.036	28.603.036
1. Pajak Daerah	11.885.649	11.885.649
2. Retribusi Daerah	7.972.987	7.972.987
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.500.000	6.500.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	2.244.400	2.244.400
2. Pendapatan Transfer	851.026.032	851.026.032
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	829.891.241	829.891.241
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.134.791	21.134.791
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.802.200	6.802.200
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	6.802.200	6.802.200

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 15 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.576.868.095	1.576.868.095
1. Pendapatan Asli Daerah	333.985.000	333.985.000
1. Pajak Daerah	225.373.232	225.373.232
2. Retribusi Daerah	77.852.500	77.852.500
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.500.000	4.500.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	26.259.268	26.259.268
2. Pendapatan Transfer	1.228.703.071	1.228.703.071
1. Pendapatan Transfer Pemerintah	1.187.669.964	1.187.669.964
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.033.107	41.033.107
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.180.024	14.180.024
1. Pendapatan Hibah	1.060.269	1.060.269
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	13.119.755	13.119.755

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 16 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	641.424.179	641.424.179
1. Pendapatan Asli Daerah	26.760.179	26.760.179
1. Pajak Daerah	6.531.113	6.531.113
2. Retribusi Daerah	4.214.422	4.214.422
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.500.000	3.500.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	12.514.644	12.514.644
2. Pendapatan Transfer	609.338.291	609.338.291
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	591.472.007	591.472.007
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.866.284	17.866.284
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.325.709	5.325.709
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	5.325.709	5.325.709

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 17 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.121.553.140	1.121.553.140
1. Pendapatan Asli Daerah	37.192.036	37.192.036
1. Pajak Daerah	16.268.875	16.268.875
2. Retribusi Daerah	9.896.969	9.896.969
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.075.077	7.075.077
4. Lain-lain PAD yang Sah	3.951.115	3.951.115
2. Pendapatan Transfer	1.063.560.410	1.063.560.410
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.039.098.927	1.039.098.927
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.461.483	24.461.483
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.800.694	20.800.694
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	20.800.694	20.800.694

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 18 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	718.708.824	718.708.824
1. Pendapatan Asli Daerah	41.351.885	41.351.885
1. Pajak Daerah	7.033.647	7.033.647
2. Retribusi Daerah	6.527.661	6.527.661
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.207.175	4.207.175
4. Lain-lain PAD yang Sah	23.583.402	23.583.402
2. Pendapatan Transfer	670.384.939	670.384.939
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	647.886.893	647.886.893
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.498.046	22.498.046
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.972.000	6.972.000
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	6.972.000	6.972.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 19 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.217.847.487	1.217.847.487
1. Pendapatan Asli Daerah	65.256.000	65.256.000
1. Pajak Daerah	29.310.924	29.310.924
2. Retribusi Daerah	3.184.189	3.184.189
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.000.000	13.000.000
4. Lain-lain PAD yang Sah	19.760.887	19.760.887
2. Pendapatan Transfer	1.140.055.084	1.140.055.084
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.110.190.060	1.110.190.060
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	29.865.024	29.865.024
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.536.403	12.536.403
1. Pendapatan Hibah	257.200	257.200
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	12.279.203	12.279.203

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 20 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	649.714.461	649.714.461
1. Pendapatan Asli Daerah	42.780.774	42.780.774
1. Pajak Daerah	4.683.066	4.683.066
2. Retribusi Daerah	27.082.740	27.082.740
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan	3.668.468	3.668.468
4. Lain-lain PAD yang Sah Revenue	7.346.500	7.346.500
2. Pendapatan Transfer	599.352.951	599.352.951
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	581.201.974	581.201.974
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	18.150.977	18.150.977
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.580.736	7.580.736
1. Pendapatan Hibah	1.699.800	1.699.800
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	5.880.936	5.880.936

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 21 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	893.681.680	893.681.680
1. Pendapatan Asli Daerah	38.398.112	38.398.112
1. Pajak Daerah	9.572.000	9.572.000
2. Retribusi Daerah	1.392.500	1.392.500
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	9.000.000	9.000.000
4. Lain-lain PAD yang Sah Revenue	18.433.612	18.433.612
2. Pendapatan Transfer	847.283.568	847.283.568
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	825.520.999	825.520.999
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	21.762.569	21.762.569
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.000.000	8.000.000
1. Pendapatan Hibah	—	—
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	8.000.000	8.000.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 22 Pendapatan Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1.156.532.343	1.156.532.343
1. Pendapatan Asli Daerah	210.060.983	210.060.983
1. Pajak Daerah	120.320.000	120.320.000
2. Retribusi Daerah	56.951.000	56.951.000
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.764.983	13.764.983
4. Lain-lain PAD yang Sah Revenue	19.025.000	19.025.000
2. Pendapatan Transfer	929.518.960	929.518.960
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	862.978.654	862.978.654
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	66.540.306	66.540.306
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.952.400	16.952.400
1. Pendapatan Hibah	3.500.000	3.500.000
2. Dana Darurat	—	—
3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan	13.452.400	13.452.400

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 23 Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	785.741.086	785.741.086
1. Belanja Operasi	485.788.297	485.788.297
1. Belanja Pegawai	262.194.931	262.194.931
2. Belanja Barang dan Jasa	—	—
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	6.024.733	6.024.733
6. Belanja Bantuan Sosial	—	—
2. Belanja Modal	200.954.112	200.954.112
3. Belanja Tidak Terduga	1.668.676	1.668.676
4. Belanja Transfer	97.330.001	97.330.001
1. Belanja Bagi Hasil	399.045	399.045
2. Belanja Bantuan Keuangan	96.930.956	96.930.956
PEMBIAYAAN DAERAH	22.294.528	22.294.528

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 24 Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	828.624.421	828.624.421
1. Belanja Operasi	484.371.174	484.371.174
1. Belanja Pegawai	334.855.100	334.855.100
2. Belanja Barang dan Jasa	—	—
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	8.242.347	8.242.347
5. Belanja Hibah	1.155.800	1.155.800
6. Belanja Bantuan Sosial	236.725.660	236.725.660
2. Belanja Modal	34.176.718	34.176.718
3. Belanja Tidak Terduga	203.089.007	203.089.007
4. Belanja Transfer	203.089.007	203.089.007
1. Belanja Bagi Hasil	—	—
2. Belanja Bantuan Keuangan	63.112.898	63.112.898
PEMBIAYAAN DAERAH	63.112.898	63.112.898

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 25 Belanja Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.373.474.066	1.373.474.066
1. Belanja Operasi	520.544.202	520.544.202
1. Belanja Pegawai	466.622.809	466.622.809
2. Belanja Barang dan Jasa	—	—
3. Belanja Bunga	1.247.249	1.247.249
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	1.197.710	1.197.710
6. Belanja Bantuan Sosial	459.000	459.000
2. Belanja Modal	158.145.354	158.145.354
3. Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000
4. Belanja Transfer	222.257.742	222.257.742
1. Belanja Bagi Hasil	4.939.908	4.939.908
2. Belanja Bantuan Keuangan	217.317.834	217.317.834
PEMBIAYAAN DAERAH	39.788.972	39.788.972

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 26 Belanja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.583.997.503	1.583.997.503
1. Belanja Operasi	1.036.732.045	1.036.732.045
1. Belanja Pegawai	693.083.916	693.083.916
2. Belanja Barang dan Jasa	329.020.556	329.020.556
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	12.527.573	12.527.573
6. Belanja Bantuan Sosial	2.100.000	2.100.000
2. Belanja Modal	216.612.080	216.612.080
3. Belanja Tidak Terduga	4.000.000	4.000.000
4. Belanja Transfer	326.653.378	326.653.378
1. Belanja Bagi Hasil	—	—
2. Belanja Bantuan Keuangan	326.653.378	326.653.378
PEMBIAYAAN DAERAH	-6.000.000	-6.000.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 27 Belanja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
BELANJA DAERAH	1.126.420.289	1.126.420.289
1. Belanja Operasi	791.956.664	791.956.664
1. Belanja Pegawai	484.899.932	484.899.932
2. Belanja Barang dan Jasa	303.329.712	303.329.712
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	2.912.020	2.912.020
6. Belanja Bantuan Sosial	815.000	815.000
2. Belanja Modal	111.676.378	111.676.378
3. Belanja Tidak Terduga	18.809.829	18.809.829
4. Belanja Transfer	203.977.418	203.977.418
1. Belanja Bagi Hasil	—	—
2. Belanja Bantuan Keuangan	203.977.418	203.977.418
PEMBIAYAAN DAERAH	39.513.314	39.513.314

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 28 Belanja Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	970.893.667	970.893.667
1. Belanja Operasi	682.213.554	682.213.554
1. Belanja Pegawai	413.357.099	413.357.099
2. Belanja Barang dan Jasa	250.231.239	250.231.239
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	18.375.216	18.375.216
6. Belanja Bantuan Sosial	250.000	250.000
2. Belanja Modal	170.483.950	170.483.950
3. Belanja Tidak Terduga	3.234.868	3.234.868
4. Belanja Transfer	114.961.295	114.961.295
1. Belanja Bagi Hasil	2.696.667	2.696.667
2. Belanja Bantuan Keuangan	112.264.628	112.264.628
PEMBIAYAAN DAERAH	23.045.715	23.045.715

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 29 Belanja Pemerintah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.064.447.022	1.064.447.022
1. Belanja Operasi	740.759.862	740.759.862
1. Belanja Pegawai	384.943.780	384.943.780
2. Belanja Barang dan Jasa	284.853.808	284.853.808
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	51.451.132	51.451.132
6. Belanja Bantuan Sosial	19.511.142	19.511.142
2. Belanja Modal	143.854.805	143.854.805
3. Belanja Tidak Terduga	4.000.000	4.000.000
4. Belanja Transfer	175.832.355	175.832.355
1. Belanja Bagi Hasil	880.000	880.000
2. Belanja Bantuan Keuangan	174.952.355	174.952.355
PEMBIAYAAN DAERAH	-5.000.00	-5.000.00

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 30 Belanja Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	931.080.096	931.080.096
1. Belanja Operasi	552.342.953	552.342.953
1. Belanja Pegawai	342.060.745	342.060.745
2. Belanja Barang dan Jasa	186.985.321	186.985.321
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	5.353.594	5.353.594
6. Belanja Bantuan Sosial	7.373.375	7.373.375
2. Belanja Modal	215.398.798	215.398.798
3. Belanja Tidak Terduga	804.734	804.734
4. Belanja Transfer	162.533.611	162.533.611
2. Belanja Bagi Hasil	3.423.196	3.423.196
3. Belanja Bantuan Keuangan	159.110.415	159.110.415
PEMBIAYAAN DAERAH	67.657.794	67.657.794

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 31 Belanja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.133.485.982	1.133.485.982
1. Belanja Operasi	799.123.832	799.123.832
1. Belanja Pegawai	483.950.265	483.950.265
2. Belanja Barang dan Jasa	275.709.441	275.709.441
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	37.000	37.000
5. Belanja Hibah	36.750.776	36.750.776
6. Belanja Bantuan Sosial	2.676.350	2.676.350
2. Belanja Modal	77.510.182	77.510.182
3. Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000
4. Belanja Transfer	253.851.968	253.851.968
1. Belanja Bagi Hasil	1.578.000	1.578.000
2. Belanja Bantuan Keuangan	252.273.968	252.273.968
PEMBIAYAAN DAERAH	-5.900.000	-5.900.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 32 Belanja Pemerintah Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
BELANJA DAERAH	1.356.500.000	1.356.500.000
1. Belanja Operasi	971.422.174	971.422.174
1. Belanja Pegawai	561.150.365	561.150.365
2. Belanja Barang dan Jasa	347.966.842	347.966.842
3. Belanja Bunga	13.972.164	13.972.164
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	44.191.435	44.191.435
6. Belanja Bantuan Sosial	4.141.368	4.141.368
2. Belanja Modal	182.644.790	182.644.790
3. Belanja Tidak Terduga	2.541.74	2.541.74
4. Belanja Transfer	199.891.287	199.891.287
1. Belanja Bagi Hasil	3.327.00	3.327.00
2. Belanja Bantuan Keuangan	196.564.287	196.564.287
PEMBIAYAAN DAERAH	164.150.000	164.150.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 33 Belanja Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.192.919.899	1.192.919.899
1. Belanja Operasi	785.378.763	785.378.763
1. Belanja Pegawai	494.449.423	494.449.423
2. Belanja Barang dan Jasa	241.190.461	241.190.461
3. Belanja Bunga	1.087.500	1.087.500
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	48.531.979	48.531.979
6. Belanja Bantuan Sosial	119.400	119.400
2. Belanja Modal	146.712.883	146.712.883
3. Belanja Tidak Terduga	7.019.70	7.019.70
4. Belanja Transfer	253.808.549	253.808.549
1. Belanja Bagi Hasil	3.415.823	3.415.823
2. Belanja Bantuan Keuangan	250.392.726	250.392.726
PEMBIAYAAN DAERAH	7.000.000	7.000.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 34 Belanja Pemerintah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	858.689.086	858.689.086
1. Belanja Operasi	546.075.970	546.075.970
1. Belanja Pegawai	351.951.426	351.951.426
2. Belanja Barang dan Jasa	182.560.198	182.560.198
3. Belanja Bunga	4.914.063	4.914.063
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	3.575.283	3.575.283
6. Belanja Bantuan Sosial	3.075.000	3.075.000
2. Belanja Modal	153.579.462	153.579.462
3. Belanja Tidak Terduga	7.500.000	7.500.000
4. Belanja Transfer	151.533.654	151.533.654
1. Belanja Bagi Hasil	1.024.492	1.024.492
2. Belanja Bantuan Keuangan	150.509.162	150.509.162
PEMBIAYAAN DAERAH	8.315.548	8.315.548

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 35 Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
BELANJA DAERAH	1.279.330.540	1.279.330.540
1. Belanja Operasi	812.196.859	812.196.859
1. Belanja Pegawai	443.458.842	443.458.842
2. Belanja Barang dan Jasa	262.783.846	262.783.846
3. Belanja Bunga	5.800.000	5.800.000
4. Belanja Subsidi	-	-
5. Belanja Hibah	83.814.430	83.814.430
6. Belanja Bantuan Sosial	16.339.741	16.339.741
2. Belanja Modal	290.203.094	290.203.094
3. Belanja Tidak Terduga	7.000.000	7.000.000
4. Belanja Transfer	169.930.587	169.930.587
1. Belanja Bagi Hasil	4.951.164	4.951.164
2. Belanja Bantuan Keuangan	164.979.423	164.979.423
PEMBIAYAAN DAERAH	54.940.587	54.940.587

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 36 Belanja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	908.931.268	908.931.268
1. Belanja Operasi	591.460.952	591.460.952
1. Belanja Pegawai	352.674.810	352.674.810
2. Belanja Barang dan Jasa	220.579.674	220.579.674
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	17.623.968	17.623.968
6. Belanja Bantuan Sosial	582.500	582.500
2. Belanja Modal	158.380.405	158.380.405
3. Belanja Tidak Terduga	5.764.970	5.764.970
4. Belanja Transfer	153.324.941	153.324.941
1. Belanja Bagi Hasil	1.985.869	1.985.869
2. Belanja Bantuan Keuangan	151.339.072	151.339.072
PEMBIAYAAN DAERAH	22.500.000	22.500.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 37 Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.573.546.028	1.573.546.028
1. Belanja Operasi	932.524.102	932.524.102
1. Belanja Pegawai	485.088.864	485.088.864
2. Belanja Barang dan Jasa	412.074.999	412.074.999
3. Belanja Bunga	15.490.191	15.490.191
4. Belanja Subsidi	-	-
5. Belanja Hibah	19.870.048	19.870.048
6. Belanja Bantuan Sosial	-	-
2. Belanja Modal	429.240.405	429.240.405
3. Belanja Tidak Terduga	12.871.825	12.871.825
4. Belanja Transfer	198.909.696	198.909.696
1. Belanja Bagi Hasil	10.529.599	10.529.599
2. Belanja Bantuan Keuangan	188.380.097	188.380.097
PEMBIAYAAN DAERAH	-3.322.067	-3.322.067

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 38 Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	650.924.179	650.924.179
1. Belanja Operasi	411.786.317	411.786.317
1. Belanja Pegawai	218.325.313	218.325.313
2. Belanja Barang dan Jasa	157.877.671	157.877.671
3. Belanja Bunga	-	-
4. Belanja Subsidi	-	-
5. Belanja Hibah	8.475.333	8.475.333
6. Belanja Bantuan Sosial	27.108.000	27.108.000
2. Belanja Modal	136.362.278	136.362.278
3. Belanja Tidak Terduga	1.500.000	1.500.000
4. Belanja Transfer	101.275.584	101.275.584
1. Belanja Bagi Hasil	1.056.295	1.056.295
2. Belanja Bantuan Keuangan	100.219.289	100.219.289
PEMBIAYAAN DAERAH	9.500.000	9.500.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 39 Belanja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.121.553.140	1.121.553.140
1. Belanja Operasi	692.644.930	692.644.930
1. Belanja Pegawai	349.891.802	349.891.802
2. Belanja Barang dan Jasa	297.776.406	297.776.406
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	294.000	294.000
5. Belanja Hibah	30.390.235	30.390.235
6. Belanja Bantuan Sosial	14.292.487	14.292.487
2. Belanja Modal	175.763.098	175.763.098
3. Belanja Tidak Terduga	5.000.000	5.000.000
4. Belanja Transfer	248.145.112	248.145.112
1. Belanja Bagi Hasil	1.937.866	1.937.866
2. Belanja Bantuan Keuangan	246.207.24	246.207.24
PEMBIAYAAN DAERAH	—	—

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
 Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 40 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	727.208.824	727.208.824
1. Belanja Operasi	494.684.137	494.684.137
1. Belanja Pegawai	301.033.396	301.033.396
2. Belanja Barang dan Jasa	168.630.969	168.630.969
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	25.019.772	25.019.772
6. Belanja Bantuan Sosial	—	—
2. Belanja Modal	81.872.777	81.872.777
3. Belanja Tidak Terduga	26.972.943	26.972.943
4. Belanja Transfer	123.678.967	123.678.967
1. Belanja Bagi Hasil	1.342.462	1.342.462
2. Belanja Bantuan Keuangan	122.336.505	122.336.505
PEMBIAYAAN DAERAH	8.500.000	8.500.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 41 Belanja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
(ribu rupiah), 2023**

Rincian/ (1)	Anggaran 2023 (2)	Realisasi 2023* (3)
BELANJA DAERAH	1.291.162.487	1.291.162.487
1. Belanja Operasi	1.291.162.487	1.291.162.487
1. Belanja Pegawai	421.914.744	421.914.744
2. Belanja Barang dan Jasa	264.218.769	264.218.769
3. Belanja Bunga	2.000.000	2.000.000
4. Belanja Subsidi	-	-
5. Belanja Hibah	16.125.359	16.125.359
6. Belanja Bantuan Sosial	14.565.000	14.565.000
2. Belanja Modal	379.096.132	379.096.132
3. Belanja Tidak Terduga	2.000.010	2.000.010
4. Belanja Transfer	191.242.473	191.242.473
1. Belanja Bagi Hasil	3.249.511	3.249.511
2. Belanja Bantuan Keuangan	187.992.962	187.992.962
PEMBIAYAAN DAERAH	73.315.000	73.315.000

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 42 Belanja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	660.979.295	660.979.295
1. Belanja Operasi	409.651.871	409.651.871
1. Belanja Pegawai	234.517.175	234.517.175
2. Belanja Barang dan Jasa	163.222.572	163.222.572
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	8.590.204	8.590.204
6. Belanja Bantuan Sosial	3.321.920	3.321.920
2. Belanja Modal	149.815.154	149.815.154
3. Belanja Tidak Terduga	5.000.000	5.000.000
4. Belanja Transfer	96.512.270	96.512.270
1. Belanja Bagi Hasil	468.307	468.307
2. Belanja Bantuan Keuangan	96.043.963	96.043.963
PEMBIAYAAN DAERAH	11.264.834	11.264.834

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 43 Belanja Pemerintah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah), 2023

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	933.875.689	933.875.689
1. Belanja Operasi	553.390.472	553.390.472
1. Belanja Pegawai	314.830.511	314.830.511
2. Belanja Barang dan Jasa	225.719.802	225.719.802
3. Belanja Bunga	–	–
4. Belanja Subsidi	–	–
5. Belanja Hibah	8.502.359	8.502.359
6. Belanja Bantuan Sosial	4.337.800	4.337.800
2. Belanja Modal	221.161.002	221.161.002
3. Belanja Tidak Terduga	1.000.000	1.000.000
4. Belanja Transfer	158.324.215	158.324.215
1. Belanja Bagi Hasil	1.182.326	1.182.326
2. Belanja Bantuan Keuangan	157.141.889	157.141.889
C. PEMBIAYAAN DAERAH	40.194.009	40.194.009

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

**Lampiran 44 Belanja Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu rupiah),
2023**

Rincian	Anggaran 2023	Realisasi 2023*
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	1.152.854.784	1.152.854.784
1. Belanja Operasi	998.104.745	998.104.745
1. Belanja Pegawai	570.035.700	570.035.700
2. Belanja Barang dan Jasa	400.341.211	400.341.211
3. Belanja Bunga	—	—
4. Belanja Subsidi	—	—
5. Belanja Hibah	23.093.970	23.093.970
6. Belanja Bantuan Sosial	4.633.864	4.633.864
2. Belanja Modal	139.750.039	139.750.039
3. Belanja Tidak Terduga	15.000.000	15.000.000
4. Belanja Transfer	—	—
1. Belanja Bagi Hasil	—	—
2. Belanja Bantuan Keuangan	—	—
PEMBIAYAAN DAERAH	-3.677.559	-3.677.559

Catatan: *Data Realisasi 2023 merupakan angka sementara
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111

Telp (0380) 826289, 821755

Faks (0380) 833124

Mailbox: pst5300@bps.go.id, bps5300@bps.go.id

ISSN 2528-2158



9 772528 215006 >